

Pengelolaan Pasar Ikan Oeba Dalam Perspektif Tata Kelola Dan Relasi Kuasa

Angelicha Elizabeth Karimon¹, Ananias R. Philip. Jacob², Frans W. Muskanan³, Boli Tonda Baso⁴

^{1,2,3,4}Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
angelicaelizabeth796@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze power relations in the governance of the Oeba Fish Market in Kupang City, focusing on spatial arrangement, facility provision, and retribution mechanisms between the government and vendors. The market is understood as a socio-political arena reflecting unequal positions among actors. Employing a qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using the interactive model by Miles, Huberman, and Saldaña. The analysis applies Michel Foucault's perspective of power relations and governance elements. The results indicate that power relations operate through three main mechanisms. First, spatial arrangement via zoning creates differential access and socio-economic positions among vendors. Second, unbalanced facility provision leaves operational needs largely borne by vendors. Third, fiscal mechanisms demonstrate government authority in regulating economic activity. This study contributes to local political studies and provides input for stakeholders to establish a participatory, fair, and sustainable market governance.

Keyword: Power Relations, Governance, Oeba Fish Market, Michel Foucault, Fish Vendors

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi kuasa dalam tata kelola Pasar Ikan Oeba Kota Kupang, dengan fokus pada pengaturan ruang, penyediaan fasilitas, dan retribusi antara pemerintah dan pedagang. Pasar ini dipahami sebagai arena sosial-politik yang mencerminkan ketimpangan posisi antaraktor. Menggunakan metode kualitatif berpendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis ini menerapkan perspektif relasi kuasa Michel Foucault serta pendekatan elemen tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa bekerja melalui tiga mekanisme. Pertama, penataan ruang melalui zonasi menciptakan perbedaan akses dan posisi sosial-ekonomi antarpedagang. Kedua, penyediaan fasilitas yang tidak seimbang membuat kebutuhan operasional dibebankan secara mandiri kepada pedagang. Ketiga, mekanisme fiskal menunjukkan dominasi kewenangan pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik lokal serta memberi masukan bagi pengelola untuk mewujudkan tata kelola pasar yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Relasi Kuasa, Tata Kelola, Pasar Ikan Oeba, Michel Foucault, Pedagang Ikan

Copyright (c) 2026 Angelicha Elizabeth Karimon, Ananias R. Philip. Jacob, Frans W. Muskanan, Boli Tonda Baso

✉Corresponding author: Angelicha Elizabeth Karimon

Email Address: angelicaelizabeth796@gmail.com (Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia)

Received 5 Oktober 2026, Accepted 10 Oktober 2026, Published 15 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Pasar Ikan Oeba merupakan salah satu pusat distribusi ikan utama di Kota Kupang yang mempertemukan pemerintah daerah dan pedagang ikan dalam satu ruang ekonomi yang sama. Secara kelembagaan, Pasar Ikan Oeba merupakan bagian dari kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam praktiknya, tata kelola pasar ini menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari fasilitas sanitasi, drainase, ketersediaan air bersih, tidak tersedianya fasilitas penyimpanan ikan (cold storage), hingga

penataan lapak yang kurang teratur. Kebijakan kenaikan retribusi melalui Pergub NTT No. 33 Tahun 2025 dan Perda Provinsi NTT No. 1 Tahun 2024 juga memperlihatkan ketegangan dalam tata kelola pasar karena diberlakukan di tengah fasilitas yang belum memadai dan tanpa melibatkan partisipasi pedagang dalam proses pengambilan keputusan.

Persoalan fasilitas, penataan ruang, dan kebijakan retribusi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan di Pasar Ikan Oeba tidak semata-mata bersifat teknis administratif, melainkan berkaitan dengan bagaimana kuasa bekerja dalam pengaturan ruang, akses fasilitas, serta pengambilan keputusan. Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault yang memandang kekuasaan tidak hanya berada pada institusi formal, tetapi tersebar dalam praktik sehari-hari, pengawasan, aturan teknis, dan pengaturan ruang (Foucault, 1977; Foucault, 1978). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan elemen tata kelola yang menekankan aspek materialitas dan institusi dalam memahami hubungan antara kondisi fisik pasar, aturan formal, serta praktik sosial (Kurniawan, 2021). Pasar Ikan Oeba dipahami sebagai arena di mana kuasa diproduksi dan dijalankan melalui pengaturan fasilitas, distribusi lapak, dan mekanisme retribusi yang membentuk struktur posisi yang tidak seimbang antara pemerintah dan pedagang.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi kuasa bekerja dalam tata kelola Pasar Ikan Oeba di Kota Kupang? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa bekerja dalam tata kelola Pasar Ikan Oeba, khususnya dalam pengaturan ruang, pengawasan fasilitas, dan pengambilan keputusan antara pemerintah dan pedagang ikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian politik lokal dan administrasi publik, serta manfaat praktis sebagai bahan refleksi bagi pengelola pasar dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang lebih adil dan partisipatif..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam dinamika relasi kuasa dalam tata kelola Pasar Ikan Oeba di Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial yang kompleks serta memahami makna, tindakan, dan relasi antara pemerintah dan pedagang ikan secara kontekstual. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi para pedagang ikan di Pasar Ikan Oeba serta pihak pengelola pasar dan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan langsung, pemahaman mendalam mengenai tata kelola pasar, serta pengalaman terkait kebijakan dan fasilitas di Pasar Ikan Oeba.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap kondisi fisik dan aktivitas harian di pasar, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, serta studi dokumentasi yang mencakup peraturan daerah, peraturan gubernur, arsip kebijakan, dan literatur terkait. Variabel atau fokus yang

diukur dalam penelitian ini meliputi praktik pengaturan ruang dan fasilitas pasar, mekanisme pengawasan serta penerapan retribusi, bentuk-bentuk resistensi atau negosiasi pedagang, serta pola pengambilan keputusan oleh otoritas pengelola.

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tahapan pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (drawing and verifying conclusions). Analisis difokuskan untuk menginterpretasikan bagaimana kuasa bekerja dalam tata kelola pasar melalui kerangka teoretis relasi kuasa tanpa menggunakan model atau rumus statistik yang bersifat kuantitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Materialitas: Karakteristik Komoditas dan Ketersediaan Infrastruktur Pasar

Elemen pertama dalam tata kelola adalah materialitas, yang merujuk pada sifat fisik komoditas yang diperdagangkan serta dukungan infrastruktur fisik yang tersedia di dalam pasar. Komoditas utama di Pasar Ikan Oeba adalah ikan segar, yang memiliki karakteristik khas berupa sifat yang mudah rusak (perishable goods). Oleh karena itu, aktivitas perdagangan ini sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung seperti cold storage (ruang pendingin), sistem drainase yang baik, serta pasokan air bersih yang memadai untuk menjaga kebersihan dan kesegaran komoditas. Namun, hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa kondisi material Pasar Ikan Oeba masih jauh dari standar ideal.

Fasilitas dasar seperti cold storage tidak berfungsi secara optimal, ketersediaan air bersih sering mengalami kendala, dan sistem sanitasi di beberapa titik pasar kurang memadai. Akibat dari keterbatasan fasilitas tersebut, para pedagang terpaksa melakukan penyesuaian secara mandiri dengan menyediakan kotak pendingin (coolbox) dan es batu sendiri, serta menggunakan air laut ketika pasokan air bersih di toilet mengalami kemacetan. Dalam perspektif elemen tata kelola Kurniawan (2021), kondisi ini menunjukkan adanya diskoneksi antara karakteristik material komoditas yang membutuhkan penanganan khusus dengan minimnya penyediaan infrastruktur pendukung oleh pihak pengelola. Ketika elemen materialitas tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, beban operasional beralih secara sepihak kepada pedagang. Hal ini memperlihatkan bahwa tata kelola pasar tidak cukup hanya berfokus pada penarikan retribusi dan penertiban administratif, melainkan harus mampu merespons kebutuhan material yang menjadi prasyarat utama aktivitas ekonomi.

Institusi: Pertemuan Antara Regulasi Formal dan Praktik Informal

Elemen kedua dalam pendekatan tata kelola adalah institusi, yang mencakup aturan formal (seperti peraturan perundang-undangan, perda, dan keputusan administratif) serta aturan informal (seperti norma sosial, kebiasaan, dan jaringan kekerabatan) yang mengatur interaksi antaraktor. Institusi berfungsi sebagai kerangka yang menentukan kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta distribusi hak dan kewajiban dalam sistem tata kelola. Dalam konteks Pasar Ikan Oeba, institusi formal

direpresentasikan melalui kewenangan UPT PPI Oeba di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta regulasi fiskal seperti Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui institusi formal ini, pemerintah menetapkan zonasi lapak, besaran tarif retribusi, serta mekanisme pengawasan harian secara terstruktur dan top-down. Pedagang ditempatkan sebagai subjek yang harus mematuhi aturan formal tersebut tanpa memiliki ruang partisipasi yang memadai dalam perumusan kebijakan. Namun di sisi lain, ditemukan pula bentuk-bentuk institusi informal dan praktik adaptasi di kalangan pedagang. Keterbatasan ruang lapak dan kurangnya transparansi dalam distribusi tempat membuat pedagang mengembangkan jaringan sosial serta strategi informal untuk mempertahankan akses mereka terhadap ruang ekonomi. Praktik swadaya seperti pengadaan fasilitas es batu dan perbaikan meja lapak secara mandiri merupakan bentuk penegasan aturan informal yang lahir akibat kevakuman peran pengelola dalam memenuhi kebutuhan operasional pedagang. Interaksi ini menunjukkan bahwa tata kelola Pasar Ikan Oeba berjalan dalam ketegangan antara otoritas birokratis yang kaku dan realitas sosial-ekonomi di lapangan. Ketika aturan formal diterapkan secara sepihak tanpa mengakomodasi partisipasi pedagang dan tanpa diimbangi pemenuhan fasilitas material yang layak, prinsip-prinsip good governance belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pengelolaan.

Jaringan Aktor dan Relasi Kuasa dalam Tata Kelola Pasar

Elemen ketiga berkaitan dengan jaringan aktor (actor networks) dan relasi kuasa yang terbangun di dalam ruang pengelolaan pasar. Tata kelola tidak dipahami sekadar sebagai hubungan administratif, melainkan sebagai arena interaksi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dengan kepentingan, sumber daya, dan kapasitas pengaruh yang berbeda. Di Pasar Ikan Oeba, jaringan aktor yang terlibat terbagi ke dalam tiga kelompok utama: Pemerintah (UPT PPI Oeba dan Dinas terkait) yang memegang otoritas legal-formal dalam pembuatan kebijakan, penarikan retribusi, serta pengelolaan fasilitas umum. Pedagang ikan (tetap maupun pengecer kecil) sebagai aktor ekonomi utama yang mengandalkan aktivitas harian pasar untuk penghidupan mereka. Aktor pendukung atau pihak ketiga informal (seperti penyedia jasa angkut, penyedia es, dan jaringan paguyuban lokal) yang turut membentuk dinamika sirkulasi barang. Hasil analisis menunjukkan bahwa relasi kuasa antara aktor-aktor tersebut cenderung asimetris. Pemerintah memiliki posisi dominan dalam menentukan kebijakan penataan, jam operasional, serta pungutan retribusi secara top-down, di mana komunikasi yang terjalin lebih banyak berupa sosialisasi satu arah. Akibatnya, aspirasi pedagang terkait perbaikan infrastruktur dan transparansi dana retribusi kerap tidak terakomodasi secara optimal. Di sisi lain, para pedagang tidak sepenuhnya pasif. Mereka membangun jaringan solidaritas internal dan strategi adaptasi informal untuk merespons kebijakan yang dianggap merugikan. Bentuk-bentuk resistensi halus, negosiasi informal saat penarikan retribusi, hingga swadaya pengelolaan kebersihan menunjukkan bahwa kuasa di Pasar Ikan Oeba tidak berpusat sepenuhnya pada birokrasi pengelola, melainkan terdistribusi dalam bentuk tawar-menawar harian (everyday politics) antara pedagang dan petugas di lapangan. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola pasar sangat bergantung pada sejauh mana pengelola mampu

mentransformasikan relasi kuasa yang hierarkis menjadi kemitraan kolaboratif. Tanpa adanya pelibatan aktif para pedagang dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan bersama, kebijakan penataan pasar akan terus menghadapi hambatan implementasi di tingkat operasional.

KESIMPULAN

Pengelolaan Pasar Ikan Oeba pada dasarnya belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada diskoneksi antara karakteristik material komoditas ikan segar yang mudah rusak dengan minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai dari pihak pengelola. Selain itu, dominasi aturan formal yang bersifat top-down oleh birokrasi pemerintah sering kali berjalan kaku tanpa diimbangi oleh ruang partisipasi yang memadai bagi pedagang, sehingga memicu tumbuhnya praktik-praktik informal serta jaringan adaptasi mandiri di tingkat bawah. Asimetri relasi kuasa antara pengelola dan pedagang juga memperlihatkan bahwa tata kelola pasar masih menempatkan pedagang sebagai objek kebijakan alih-alih sebagai mitra strategis, yang pada akhirnya menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan pasar sangat bergantung pada kemampuan pengelola untuk membangun sinergi kolaboratif, transparansi, serta pemenuhan fasilitas material dan institusional yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality: Volume I: An Introduction*. New York: Random House.
- Kurniawan, D. (2021). *Tata Kelola Publik dan Relasi Kuasa di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.